



**SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2013-2014**

JUMAT, 16 AGUSTUS 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2013**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2013-2014**

JUMAT, 16 AGUSTUS 2013
Pukul: 14.30 WIB

ACARA:

1. Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014.
2. Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya beserta Dokumen Pendukung.

**KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
DIDAMPINGI OLEH PIMPINAN DPR-RI DAN DPD-RI**

PEMBAWA ACARA:

1. Presiden dan Wakil Presiden didampingi Pimpinan DPR dan DPD memasuki Ruang Paripurna Nusantara.
2. Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

PEMBAWA ACARA:

Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

PIDATO KETUA DPR-RI

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- **Saudara Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR-RI,**
- **Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPD-RI,**
- **Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga Negara,**
- **Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,**
- **Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan,**

Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, *Alhamdulillah* siang hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPR-RI, dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 dalam keadaan sehat.

Rapat Paripurna DPR-RI siang hari ini yang juga dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI, memiliki dua agenda, yaitu: [1] Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, dan [2] Pidato

Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN 2014 dan Nota Keuangannya.

Kehadiran seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI dalam agenda Sidang Paripurna DPR-RI, berkenaan dengan peran dan fungsi pertimbangan DPD-RI atas RUU APBN 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Amanat konstitusi ini diperkuat dengan beberapa pasal dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kehadiran DPD-RI dimaksudkan untuk semakin memberikan ruang politik kepada perwakilan daerah, guna turut berperan dalam penetapan kebijakan nasional. Oleh karenanya diharapkan, Pidato Pengantar Presiden RI terhadap RUU APBN 2014, juga akan mencakup berbagai hal yang terkait dengan pembangunan daerah.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak Anggota Dewan, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR

tentang Tata Tertib, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami membuka Rapat Paripurna DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014. Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Pidato Pembukaan Masa Persidangan I, melalui forum yang terhormat ini, ijinkan kami menyampaikan ucapan *minal 'aidin wal faizin*, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H kepada Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf lahir dan bathin. Semoga kita kembali pada fitrah, saling menguatkan silaturahmi antar sesama, meningkatkan kualitas kerja kita bagi kemuliaan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, ijinkan kami memberitahukan kepada Sidang Dewan yang Terhormat, beberapa surat masuk yang telah diterima oleh Pimpinan DPR selama masa reses.

Pertama, empat buah surat masuk dari Presiden RI perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI; Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI yang diusulkan Menteri Pemuda dan Olahraga; Permohonan Pertimbangan bagi Duta Besar LBBP Republik Argentina, Kerajaan Swaziland, Republik Slovenia dan Amerika Serikat, yang telah diproses pada Masa Reses Persidangan IV yang lalu sesuai dengan Pasal 195 Tata Tertib DPR-RI. Sedangkan Permohonan Pertimbangan bagi Duta Besar LBBP Republik Afrika Selatan akan diproses lebih lanjut. Dan satu surat perihal Usul Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

Kedua, surat dari Ketua DPD-RI Perihal Penyampaian Keputusan DPD-RI tentang hasil pengawasan DPD-RI atas pelaksanaan 6 (enam) UU Republik Indonesia, dan Perihal Pandangan DPD-RI terhadap RUU tentang Pertanahan.

Dan *ketiga*, surat dari Komisi Yudisial RI perihal Pengajuan nama Calon-calon Hakim Agung.

Surat-surat masuk tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme DPR RI.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada Masa Persidangan I yang akan berlangsung mulai tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013, Dewan akan melaksanakan 3 (tiga) fungsi utamanya, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, serta tugas-tugas lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hari ini, Sidang Dewan akan mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya. Tahapan ini telah didahului dengan penyusunan RAPBN 2014 dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan antara DPR dan Pemerintah pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013. Pokok-pokok pembicaraan meliputi Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Rencana Kerja Pemerintah 2014 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 2014.

Tema RKP tahun 2014 adalah: "Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan," dengan penekanan kepada penanganan 6 (enam) isu strategis. Sedangkan tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2014 adalah: "Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi

yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”.

Sebagaimana diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, yang diarahkan bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional serta menentukan arah dan prioritas pembangunan. Sebagai instrumen, APBN bukan merupakan hasil akhir, tetapi sebuah proses yang dalam realisasinya perlu terus mendapat perhatian dan pengawasan dari para wakil rakyat, untuk memastikan bahwa APBN telah dialokasikan tepat guna dan tidak menyimpang, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pengajuan RUU APBN Tahun Anggaran 2014 oleh Presiden adalah dalam kerangka menjalankan tiga fungsi utama berkaitan dengan kebijakan fiskal, yaitu: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, maka struktur APBN harus sehat dan berkesinambungan. Tiga indikator APBN yang sehat dan berkesinambungan adalah: [1] defisit yang harus terkendali menuju keseimbangan atau surplus, [2] keseimbangan primer yang harus terjaga positif, dan [3] rasio

utang yang cenderung menurun. Pengelolaan APBN yang sehat, disamping harus memberikan prioritas pembangunan bagi tercapainya kemakmuran rakyat, juga perlu memberikan ruang atau fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi stabilisasi untuk mengantisipasi fluktuasi kondisi perekonomian nasional dan global.

Namun sebagai konsekuensi dari konstitusi dan undang-undang, mengharuskan prosentase tertentu wajib dialokasikan dalam APBN. *Mandatory spending* ini meliputi alokasi anggaran pendidikan 20%, Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26% dari penerimaan dalam negeri netto, alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan, alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, dan alokasi anggaran untuk otonomi khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2% dari DAU nasional.

Berkaitan dengan arah kebijakan fiskal, Dewan mengingatkan Pemerintah agar terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harus terdistribusi dan dirasakan oleh seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Dewan berpendapat, target pertumbuhan ekonomi di atas 6% harus mampu memperkuat

fondasi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mampu mendorong masuknya investasi asing jangka panjang. Investasi asing yang bersifat jangka pendek dinilai kurang signifikan bagi penguatan perekonomian jangka panjang, karena setiap saat dapat ditarik keluar menjadi *capital out-flow*.

Melihat pertumbuhan perekonomian global yang masih melambat sejak krisis tahun 2008, Pemerintah sebaiknya fokus pada pembenahan perekonomian domestik, antara lain dengan mendesain stimulus fiskal yang efektif guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Persoalan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk diatasi, karena akan berdampak pada laju perekonomian secara keseluruhan, melalui strategi yang bersifat komprehensif dan terkoordinasi antar-instansi pemerintah yang efektif.

Momentum pertumbuhan yang positif hendaknya menjadi dasar dalam mengembangkan sektor-sektor produktif, khususnya sektor riil. Pengembangan sektor riil, juga harus didukung instrumen kebijakan moneter yang baik, antara lain dengan mengatur fleksibilitas tingkat suku bunga perbankan. Intermediasi bank harus mampu menggairahkan ekonomi swasta, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, agar

pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang kokoh dari terpaan krisis.

Fakta lain yang harus menjadi perhatian adalah meningkatnya harga-harga barang, terutama harga barang kebutuhan pokok. Dewan menyarankan, agar peran Bulog diperkuat guna menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sebagai gambaran, kita harus mencermati target inflasi kumulatif selama tahun 2013 yang semula disepakati 4,9% menjadi 7,2% hingga akhir tahun 2013. Dewan menilai target inflasi tahun 2013 cukup tinggi, dikhawatirkan mendekati dua digit, jika Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang strategis. Psikologi pasar mengingatkan kita, sulit untuk menurunkan harga barang yang tingkat elastisitas terhadap harga yang permintaannya tinggi. Fenomena ini terjadi terutama terhadap harga barang kebutuhan pokok.

Hal lain yang menjadi perhatian Dewan adalah arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang harus fokus pada program dan kegiatan yang produktif, seperti belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan melalui subsidi non-energi. Pelaksanaannya harus diperhatikan dan dipantau secara menyeluruh, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pertumbuhan.

Dari sisi pendapatan, Dewan mendesak Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan Sumber Daya Alam. Dewan sangat mendukung kebijakan politik pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah komoditi hasil tambang. Paradigma yang menggantungkan perolehan devisa dari ekspor komoditi primer Sumber Daya Alam, harus segera ditinggalkan. Sebab, kekayaan Sumber Daya Alam bersifat bisa habis dan tidak bisa diperbaharui.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dalam rangka Pembahasan RUU APBN 2014, DPD-RI memberikan beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain:

1. Bahwa selama kurun waktu 2010-2013, pertumbuhan ekonomi daerah amat bervariasi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 2010-2013 dari daerah-daerah kaya sumber daya alam amat rendah, jauh dibawah rata-rata nasional, seperti yang terjadi di beberapa daerah, yang angka inflasinya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya. Hal ini harus menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan

fiskal. Untuk itu, diharapkan dapat dilakukan penyempurnaan fiskal untuk tahun 2014 guna mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar daerah.

2. Kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui anggaran transfer ke daerah, merupakan instrumen fiskal yang harus dikelola secara optimal untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, produktifitas dan penguatan daya saing, percepatan pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
3. Penataan pengelolaan dana transfer ke daerah perlu diperbaiki, sehingga mempunyai dampak nyata dan terukur bagi pengurangan kesenjangan fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan penerapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
4. Kesenjangan pembangunan antar daerah dan ketertinggalan daerah tertentu yang terjadi, secara bertahap perlu diatasi dengan berbagai langkah yang terencana, sistemis, konsisten dan berkesinambungan.

5. Kebijakan fiskal ke depan sebaiknya mempertimbangkan antara lain: aspek kewilayahan, jumlah penduduk, kapasitas daerah dengan target yang direncanakan dicapai untuk setiap tahunnya.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Pada Masa Persidangan I Tahun 2013-2014 ini, Dewan akan melanjutkan pembahasan terhadap RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Sejak disampaikan pada masa sidang sebelumnya, Dewan mengkritisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disimpulkan BPK-RI untuk beberapa Kementerian dan Lembaga mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan APBN, masih harus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap dan Aset Eks-BPPN, belum didasarkan pada

dokumen valid dan belum disajikan sesuai nilai bersih. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, Belanja Lain-lain, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Di samping itu, atas Laporan BPK RI terhadap APBN Tahun Anggaran 2012, Dewan juga melihat adanya kelemahan penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial, yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan serta berindikasi merugikan keuangan negara.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, Dewan meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban, sehingga sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah juga perlu melakukan pembenahan, serta memperkuat regulasi terkait kepatuhan terhadap UU. Pemerintah sudah seharusnya mencari format terbaik dalam pembenahan administrasi keuangan, khususnya dalam penyerapan APBN. Dalam konteks ini, yang perlu disempurnakan adalah proses penyederhanaan dokumen pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang

tepat waktu, sehingga APBN benar-benar dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam kerangka APBN, DPR RI melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan, akan mencermati pelaksanaan APBN 2014 yang akan mulai berjalan 1 Januari 2014. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian: *pertama*, tahun 2014 adalah tahun pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang diharapkan berlangsung aman dan tertib, stabilitas nasional tetap terjaga, kondisi politik berjalan kondusif yang semuanya akan berpengaruh pada perekonomian nasional.

Kedua, pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 akan melaksanakan APBN Triwulan IV tahun 2014. Perlu dicatat bahwa berbagai bentuk kesepakatan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yang tertuang dalam UU APBN tahun 2014, diharapkan dapat terus dilaksanakan oleh pemerintahan baru hasil Pemilu 2014.

Ketiga, tidak optimalnya realisasi penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian kita. Dewan meminta penyerapan anggaran

dapat terdistribusi secara merata, dan tidak menumpuk pada Triwulan IV atau saat tahun anggaran akan berakhir.

Demikian beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, yang pembahasannya harus selesai pada akhir bulan Oktober 2013.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan akan menyelesaikan 35 (tigapuluh lima) RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I, baik yang ada di Komisi-komisi, Badan Legislasi maupun Panitia Khusus. Beberapa RUU tersebut bahkan telah mengalami beberapa kali perpanjangan waktu pembahasan. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama yang menuntut komitmen kuat, baik dari DPR maupun Pemerintah. Harapan ini kami sampaikan baik kepada Dewan maupun kepada Presiden, karena RUU Prioritas yang harus diselesaikan, sebagaimana yang tertuang dalam Prolegnas, merupakan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, walaupun kita menyadari bahwa tahun ini merupakan tahun politik dalam rangka menghadapi Pemilu 2014.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pelaksanaan fungsi pengawasan akan berjalan bersamaan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR yang lain. Berbagai tim pengawas yang dibentuk DPR akan terus melanjutkan tugasnya, diantaranya Tim Pengawas Kasus Bank Century, Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Agraria, dan Tim Pengawas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Di samping itu, Komisi-Komisi DPR akan membahas isu-isu aktual yang perlu memperoleh penyelesaian melalui pembentukan Panitia Kerja di komisi-komisi.

Perhatian DPR juga tertuju kepada persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 oleh KPU. Permasalahan dan validitas Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang belum tuntas, penetapan aturan dana kampanye yang harus progresif tidak bersifat normatif dan tidak memberikan peluang adanya multitafsir, adalah permasalahan yang harus kita cermati. Dewan menghimbau agar KPU dan Bawaslu dapat bekerja sama, bersinergi dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilu.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berbagai permasalahan terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi perhatian DPR, antara lain menyangkut persoalan kelebihan daya tampung, lemahnya pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) terhadap narapidana, maraknya mafia peradilan, dan masalah pengetatan remisi.

Permasalahan buruh, pemutusan hubungan kerja, tunjangan hari raya, tenaga alih daya, dan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan kasus-kasus terbaru, senantiasa mendapat perhatian Dewan. UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada para TKI kita. Oleh karena itu, Dewan sudah menyiapkan RUU tentang Perlindungan Pekerja di Luar Negeri, yang segera memasuki pembicaraan tingkat I. Untuk masalah ini, bahkan Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi terkait, telah melakukan dua kali rapat konsultasi dengan para menteri terkait, untuk menuntaskan masalah amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada para WNI *overstayer* dan *non-procedural*.

Perpanjangan amnesti sampai dengan 3 November 2013, perlu kita apresiasi, namun demikian perpanjangan amnesti

tersebut tidak ada artinya jika tidak ada perubahan pola pelayanan. Untuk itu Kemenakertrans dan Kemenlu, harus bekerja sama dengan baik dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan masalah perlindungan TKI di luar negeri, mengutamakan kepentingan TKI yang sedang didera permasalahan, dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga mereka merasakan adanya perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Berbagai forum dan kerja sama internasional yang melibatkan Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa peran kita dalam kancah global, khususnya di bidang ekonomi, semakin diakui. Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam berbagai forum internasional. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang signifikan, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki statistik rata-rata pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan berbagai inisiatif baru, menghadapi lambatnya

pertumbuhan ekonomi global terutama yang menimpa negara-negara maju dan diperkirakan masih akan berlangsung lama.

Oleh karena itu, DPR berharap agar Pemerintah dapat melakukan persiapan yang baik menghadapi Konferensi Tingkat Tinggi G-20 yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September mendatang di Rusia. Di samping itu, Indonesia akan kembali memimpin APEC untuk kurun waktu 2013-2014, dan menjadi tuan rumah APEC di Bali pada bulan November mendatang. Ditengah melemahnya ekonomi dunia, APEC dituntut mampu membangun ketahanan ekonomi regional melalui berbagai program-program kongkret, yang dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi regional Asia Pasifik. DPR berharap selama masa kepemimpinan Indonesia, kita dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. DPR juga meminta Pemerintah agar memanfaatkan kesempatan itu untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Dalam upaya mengembangkan diplomasi parlemen, pada pertengahan September mendatang, DPR juga akan mengirimkan delegasi ke Sidang Umum AIPA ke-34 di Brunei Darussalam yang mengambil tema *The Role of AIPA in Realising ASEAN Community*. DPR akan mengirimkan delegasi,

dengan kesiapan penuh, duduk di berbagai komisi yang dibentuk.

Selain itu, DPR-RI sebagai Presiden SEAPAC (*South East Asian Parliamentarians Against Corruption*), akan menjadi tuan rumah Sidang Umum SEAPAC pada akhir bulan Oktober 2013 di Medan, dengan tema: *Corrupt-free Shoutheast Asia: Common Goal, Common Action*. SEAPAC merupakan sebuah *regional chapter* dari GOPAC (*Global Organization of Parliamentarians Against Corruption*) yang bertujuan untuk menguatkan kerjasama antar parlemen di Asia Tenggara dalam memerangi tindak pidana korupsi. Ketua DPR terpilih menjadi Presiden SEAPAC Periode 2013-2014 di Manila, sementara Ketua *National Chapter* GOPAC Indonesia dipercayakan kepada Wakil Ketua DPR-RI koordinator bidang Industri dan Pembangunan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dewan turut memantau perkembangan situasi politik di Mesir yang akhir-akhir ini semakin menjadi perhatian dunia, mengingat Mesir adalah negara yang mempunyai peran dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia yang diprakarsai

oleh para ulama Mesir. Instabilitas politik yang disertai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, telah mengakibatkan ratusan korban jiwa, sungguh memprihatinkan dan tidak sesuai dengan hukum internasional. DPR meminta Pemerintah untuk senantiasa mencermati kondisi politik di Mesir dan ikut berperan dalam upaya menciptakan kembali perdamaian di negara tersebut.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya.

Kepada Saudara Presiden kami persilahkan.

**PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA
PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS
RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2014**

PEMBAWA ACARA:

Penyerahan RUU APBN 2014 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukung dari Presiden RI kepada Ketua DPR-RI, dan dilanjutkan penyerahan dari Ketua DPR-RI kepada Ketua DPD-RI.

Demikianlah, telah kita ikuti bersama Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, kami mempersilahkan Saudara Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi MSi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk membacakan doa.

DOA OLEH ANGGOTA DEWAN

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, MSi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah membacakan doa, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Amiin.

Dengan telah selesainya Pidato Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPR siang dan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Anggota DPR RI dan Anggota DPD-RI, serta seluruh hadirin

yang telah memberikan perhatian dan dukungan, sehingga acara ini telah berjalan dengan tertib dan lancar.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobil'alamin*, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 saya nyatakan ditutup. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

KETOK 3X

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA:

PEMBAWA ACARA:

1. Hadirin dimohon berdiri
2. Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI MENINGGALKAN RUANG RAPAT PARIPURNA:

PEMBAWA ACARA:

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD, meninggalkan Ruang Paripurna Nusantara.

Jakarta, 16 Agustus 2013

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. MARZUKI ALIE